

# Pembacaan Konflik dari Aras Negara\* (sebuah pendekatan epistemologi-marxian)

Sutrisno\*\*

## Abstract :

*Masyarakat modern (baca: kapitalisme) dengan kebadiran negara, mengalami blunder dalam mengendalikan konflik dan potensi konflik. Betapa tidak, secara substantif kebadiran negara sendiri tidak bisa mengambil jarak dengan kelas sosial. Jadi, negara mengalami persoalan didalam dirinya sendiri, ia tidak mampu menghindari dari kontradiksi internal. Refleksi terhadap negara dengan kerangka semacam ini dipenghujung tahun 2015 melalui gonjang-ganjing saham Freeport menjadi menemukan relefansi.*

**Kata Kunci :** *Konflik Kelas, Demokrasi, Negara*

## Prolog

Memasuki abad ke-21 dimana kapitalisme mulai menapaki kematangannya, dan dua dasawarsa yang lalu negara "pendaku" sosialis-komunis semacam Uni Sovyet<sup>1</sup> rontok, justru di pusat kapitalisme --di New York -- terbit sebuah buku kecil, *Why Read Marx Today?*<sup>2</sup> Buku kecil yang terbit tahun 2002 ini ditulis Jonathan Wolff, seorang filsuf University College London. Pertanyaan dasar buku ini, *bagaimana masyarakat sampai bisa mengorganisasikan dirinya sendiri atas dasar kelas?*

Pertanyaan ini penting karena sifatnya yang substantif dalam membedah fenomena

konflik (konflik sosial) sejak awal terbentuknya masyarakat hingga berkembangnya organisasi masyarakat yang kompleks pada hari ini. Bagi Marx, gejala kelas merupakan manifestasi konflik sosial, paling tidak konflik yang bersifat *latent*. Proposisi semacam ini (konflik laten) belakangan sudah mulai di-sensitif-i kalangan otoritas keamanan (atau khususnya Polri) dalam pengendalian konflik sosial melalui formulasi konsep yang sangat umum dikenal sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK). Kalau demikian, apa yang difahami kalangan otoritas keamanan tentang FKK dalam format *grand discourse* kapitalisme yang tampil dalam wajah demokrasi hari ini ? Bagaimana formulasi FKK merespon konsep 'kelas'-nya Karl Marx? Bagaimana pula, paling tidak, secara strategik kepolisian dan otoritas keamanan lain mengendalikan/mengontrol FKK? Kalau, *toh* kepolisian mengalamatkan jawabannya pada strategi Polmas, sejauh mana ia mempunyai kompatibilitas dengan rezim sistem sosial yang menjadi wacana besar kapitalisme ini (yang didalamnya termasuk rezim politik, rezim ekonomi) ? Pada era Orde Baru otoritas keamanan hadir di parlemen

1. Dalam pendekatan Marxian yang ketat, Uni Sovyet bukanlah ilustrasi negara (komunitas sosial) sosialis/komunis yang ideal sebagaimana digagas Karl Marx. Paling tidak karena proses berdirinya negara ini justru penodaan atas hukum evolusi masyarakat. Komunisme akan hadir setelah melalui tahap kematangan kapitalisme, Uni Sovyet memotong jalan tahap-tahap evolusi yang harus dilalui itu.

2. Dua tahun setelah terbit di New York, buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Yudhi Santosa dan publish melalui penerbit kecil yang tak pernah dikenal, Penerbit Mata Angin, Yogyakarta.

\* Substansi artikel ini pernah didiskusikan pada Program Doktor Sosiologi Universitas Indonesia, 10 Agustus 2011, dengan tajuk Karl Max tentang Negara.

\*\* Sutrisno Suki, Pengajar bidang mata kuliah "Sosiologi" dan bidang mata kuliah "Filsafat" pada STIK-PTIK, Jakarta. Doktor Sosiologi diperolehnya dari Universitas Indonesia dengan disertasi Relasi Kuasa.

(sebagai utusan golongan) sehingga bisa secara langsung memberikan warna pada setiap regulasi menyangkut keamanan dan tata kelolanya. Hari ini, kehadiran otoritas keamanan di parlemen tentu dipandang menodai demokrasi.

Tentu saja tulisan pendek ini tak hendak menjawab sejumlah pertanyaan besar semacam itu. Namun, sejumlah pertanyaan pelik itu diperlukan sebagai lanskap persoalan pengendalian keamanan hubungannya dengan sistem sosial yang sublim seperti hari ini. Hemat penulis di luar pertanyaan semacam ini masih ada persoalan mendasar dalam regulasi. Yaitu, terminologi konflik sosial dalam Undang-Undang Nomor 7/2012 Pasal 1 cenderung didefinisikan sebagai gejala yang bersifat fisik,

*Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.*

Tentu saja pendefinisian konflik sosial dalam regulasi ini mereduksi realitas yang sesungguhnya, karena prinsip definisi ini menegaskan bahwa tidak ada konflik sejauh tidak ada benturan fisik dengan kekerasan. Barangkali konsekuensi dari regulasi yang berpijak pada filsafat moral utilitarian, bahwa yang (bisa) dikenai hukum hanyalah gejala yang bersifat "positiv" (= hukum positiv).

Kembali pada pertanyaan mendasar di atas. Pemenggalan pengorganisasian masyarakat atas kelas sepanjang sejarah melalui *trial-error* sistem sosial politik tak pernah bisa memberikan jawaban tuntas. Hari ini, ketika demokrasi dipercaya sebagai 'iman' dalam sistem pengorganisasian yang paling manusiawi, pengorganisasian menurut kelas pun menumpang dalam ajaran demokrasi ini.

## Marx tentang Negara

Maka, disinilah persoalannya, bagi Marx negara menjadi biang segala persoalan yang memenggal relasi kemanusiaan emansipatif. Negara menjadi mesin penindasan paling efektif di sepanjang sejarah manusia kelas sosial. Tetapi, tentu saja Marx tak bisa mengelak 'hukum sosial' hadirnya negara-negara

Tentu saja pandangan Marx tentang negara berseberangan dengan pandangan Hegel. Namun demikian secara metodik upaya memahami "negara"-nya Karl Marx tidak harus dimulai dengan mengatakan bahwa ia adalah sekedar reaksi atas pandangan Hegel (Hegelian) tentang negara. Bukan pula sekedar memberi reaksi terhadap posisi dialektika Hegel, karena pergulatan ini sudah dimulai Marx dari ontologisnya. Dalam ontologi Hegel yang nyata adalah roh, Marx menjungkirbalikkan bahwa yang riil adalah materi dari materialisme – realisme. Namun demikian upaya memahami "negara"-nya Marx tak akan lengkap tanpa melacak kembali dari Hegel.

Maka bagi Marx diskusi tentang negara hanyalah sebuah asesori dari narasi besar tentang emansipasi, pembebasan, dan aleanasi. Mengapa? Karena yang harus dilihat adalah ikhwal yang bersifat substantif dalam memenggal hubungan-hubungan sosial emansipatif dan aleanatif itu. Seratus tahun kemudian setelah sistem sosial demokrasi diposisikan sebagai 'iman' dalam masyarakat modern, proposisi marxian ini baru agak jelas namun lebih analitik dapat difahami melalui pemikiran Habermas tentang terminologi diliberatif dan tindakan komunikatif<sup>3</sup>. Disini Habermas memformulasikan manusia mempunyai dua orientasi tindakan. Orientasi pertama, adalah tindakan yang berorientasi pada pencapaian konsensus, ini disebut sebagai tindakan komunikatif. Orientasi kedua, tindakan

<sup>3</sup> . Perhatikan misalnya, Jurgen Habermas dalam *The Theory of Communicative Action: Reason and Rationalization of Society* (1982)

pada pencapaian sukses strategis, atau tindakan rasional bertujuan. Dua orientasi tindakan ini pada dasarnya bentuk elaborasi yang dilakukan Habermas dan kebanyakan pendekatan marxian atas pandangannya terhadap filsafat manusia (*worldview*), bahwa manusia adalah makhluk rasional yang bersifat komunikatif.

Sekali lagi, bagi Marx negara hanyalah elementer atau asesoris, dimana ia sekedar menjadi instrumen kelas yang memutus hubungan sosial emansipatif. Namun demikian meskipun bersifat asesoris, diskusi tentang negara akan selalu mempunyai dimensi historis yang serius terhadap perubahan sosial. Tema negara bahkan menyedot hampir semua filosof sosial dan sosiolog abad ke-20, seakan-akan perubahan sosial akan kehilangan signifikansi jika tak mengulik perihal negara. Hampir mustahil dipisahkan secara analitik antara supra struktur dan infra struktur perubahan sosial. Sublimasi supra struktur dengan infra struktur perubahan sosial menempatkan negara harus difahami sebagai satu satunya alat merealisasikan dan mengartikulasikan pembebasan. Artikulasi pandangan Hegel ada pada negara Prusia dan Jerman era Nazi (dan sedikit pada Indonesia, khususnya pada integralisme), pandangan Marx – meskipun melalui tafsir sana sini -- ada pada China dan Rusia (dan sedikit di Indonesia).

\*\*\*

Bagi Hegel, negara adalah ungkapan roh obyektif, yaitu penyatuan (titik temu) segala kepentingan dan kehendak setiap orang. Karena itu kepentingan orang-orang ditumpahkan pada negara. Manusia secara individu tidak akan pernah menemukan pembebasan jika tidak menitipkannya pada negara. Negaralah yang mengetahui kemana tujuan individu dibawa. Maka sampai disini dapat segera didtarik kesimpulan tegas bahwa negara menjadi realitas kebebasan yang kongkrit. “*The state is the concrete actualy of the ide of freedom*” Howard P. Kainz

(1974;45). Rakyat dalam pengertian demografik yang terdiri dari kumpulan orang-orang dengan demikian adalah individu-individu yang tidak tahu apa-apa tentang yang dikehendaknya. Bahkan manusia individu dalam masyarakat mengartikulasikan kepentingan secara bertubrukan, *bellum omnium contra omnes*. Masyarakat dalam kontek ini dalam Hegel disebut sebagai *bürgerliche gesellschaft*. Dalam Franz Magnis-Suseno (1992) istilah ini diterjemahkan sebagai ‘masyarakat luas’. Tetapi menurutnya tidak tepat betul diterjemahkan sebagai masyarakat sipil. Pada prinsipnya, yang dimaksud *bürgerliche gesellschaft* merujuk pada interaksi antar anggota masyarakat yang mencakup ekonomi, sosial dan kultural diluar intervensi negara. Maka fungsi negara adalah menyatukan aneka kepentingan individu yang saling bertubrukan karena egoisme setiap anggota. Disini negara adalah dasar yang memungkinkan warga negara untuk menyadari kemerdekaan mereka dalam kebersamaan dengan orang lain (Devid Held;1988). Melalui negaralah hubungan orang-orang menjadi teratur, karena melebur menjadi satu.

Yang perlu digarisbawahi dalam kerangka pemikiran semacam ini bahwa masyarakat adalah unsur dari negara. Poin ini membedakannya dengan Hegel yang mempersenyawakan negara dengan masyarakat. Dan, tentu saja karena secara analitik persenyawaan ini hampir mustahil maka masyarakat harus meletakkan “kepercayaan” pada negara. Kata “kepercayaan” – menggunakan apostrop – bukan sekedar berdimensi politis seperti pengertian “saya harus setuju pada kebijakan politik Jokowi karena ia dipilih melalui proses demokrasi”, bukan pula kepercayaan dalam pengertian bahasa inggris “trust” yang dibangun melalui proses sosial – nya Francis Fukuyama. Namun pengertian itu lebih jauh mengandung dimensi teologik. *Manunggaling Kalula lan Gusti* akan lebih dapat membantu menjelaskan ini.

Melalui analitik relasional negara-rakyat diperoleh kesimpulan bahwa dalam negaranya Hegel, pemerintah adalah subyek dan rakyat/masyarakat sebagai obyek. Karl Marx menjungkirbalikan logika Hegel tersebut. Bukan negara sebagai subyek, melainkan sebaliknya. Masyarakat dan satuan sosial terkecil (keluarga) merupakan pengandaian dari negara. Kalau demikian adanya negara yang disebut Hegel sebagai titik penyatuan kepentingan manusia atau "roh obyektif" itu tidak lain merupakan artikulasi kepentingan kelas dalam masyarakat. Negara menjadi batu sandungan emansipasi sosial karena ia akhirnya menjadi kekuatan asing diri manusia yang memaksa, meskipun pemaksaan itu untuk kearah sosial (upaya Hegel dalam mengatasi anti-sosial manusia).

Dalam bahasa aleansi Marx, negara adalah sesuatu yang terpisah dari individu. Dengan demikian Marx tidak bisa menerima negara dalam bentuk apapun, termasuk konstitusi dan undang-undang yang sebaik apapun. Yang menjadi perhatiannya negara harus ditarik kembali kedalam manusia. Ini artinya negara dengan masyarakat luas menjadi satu. Pengertian lebih kongkritnya tidak ada ruang bagi hak previlase sebagai akibat dari 'satunya' negara dengan masyarakat luas. Ketika satuan sosial itu terintegrasi tak ada lagi hak milik dan previlasi. Barangkali ilustrasinya ada pada satuan sosial keluarga.

## Refleksi

Meskipun bagi Marx negara dalam bentuk apapun merupakan batu sandungan dalam emansipasi sosial manusia, namun kehadiran negara dalam masyarakat modern adalah sebuah kenyataan yang tak dapat dihindari. Setiap struktur sosial yang menampilkan hubungan-hubungan anti-emansipatif dengan sendirinya konflik obyektif ini hadir. Pertanyaan klasik yang coba diletakkan relevansinya dalam dunia modern, apakah hubungan konfliktual buruh – majikan yang terjadi sejak pra-negara akan bisa dihindari

dengan kehadiran negara seperti hari ini? Pada kenyataannya konflik sejati buruh-majikan pada hari ini akan selalu mengalami pergeseran yang terjadi di lapangan, menjadi buruh versus instrumen negara (bukan lagi dengan majikan). Walaupun, tentu saja kenyataan ini tidak perlu bisa diletakkan sebagai formula.

Sekali lagi, meskipun negara adalah biang keladi segala persoalan emansipasi manusia modern namun kehadirannya tak bisa dilawan. Proposisi ini mendekati Nietzsche dalam elaborasinya tentang kebenaran dan kepalsuan. Bahwa, kebenaran sesungguhnya tak akan pernah ada, yang ada adalah kepalsuan, oleh karena itu manusia tidak bisa hidup tanpa kepalsuan. (Barangkali) Marx sadar bersikukuh dengan peniadaan negara justru menjadikan pemikirannya terasing dari kenyataan. Harapan pembebasan kemudian ada pada diskusi demokrasi, dimana ia menyebut demokrasi sebagai bentuk negara "rasional" terhadap monarkhi (Franz Magnis-Suseno;1992). Dalam terjemahan Magnis dari Werke jilid I, "Demokrasi adalah kebenaran monarkhi, monarkhi bukanlah kebenaran demokrasi".

Persoalannya demokrasi tak akan dapat hadir dalam masyarakat kapitalis, karena logikanya peraturan demokratis tak dapat direalisasikan dibawah tekanan dalam hubungan kapitalis produksi (David Held;2006). Bagi Marx, negara<sup>4</sup> yang bisa merepresentasikan komunitas atau publik secara keseluruhan hanyalah ilusi. Mengapa? Karena proposisi ini mengandaikan tak ada kelas dalam masyarakat; hubungan kelas tidak eksploitatif; kelas tidak mempunyai kepentingan fundamental. Padahal politik dimana ranah demokrasi hidup justru berangkat dari kepentingan-kepentingan yang berbeda pada setiap kelas dan kelompok.

Kebebasan hak pilih atau kesetaraan politik yang merupakan ikon demokrasi (demokrasi

4. Negara yang dimaksud Marx adalah seluruh perangkat pemerintah, dari eksekutif dan legeslatif sampai kepolisisan dan militer.

liberal) nampaknya dapat menjadi *entry point* pembebas (emansipasi) dengan sangat terbatas. Persoalannya terletak pada ketidak setaraan kelas. Model negara semacam ini akhirnya sulit menghindari dari rujukan 'negara minimal', batasan – batasan minimal saja intervensi negara atas kehidupan publik dan memberikan ruang bagi pasar bebas. Negara yang nampaknya netral ini sesungguhnya tidak netral, karena negara memasuki susunan kehidupan ekonomi yang paling utama dengan cara memperkuat hak milik melalui legislasi, administrasi. Disini perekonomian dianggap bukan domain politik. Hubungan – hubungan ekonomi seperti relasi antara pemilik alat produksi dan para pekerja dilepas melalui mekanisme kontrak pribadi yang bebas, tanpa perlu intervensi negara. Disini, hemat saya terdapat ruang afinitas antara demokrasi (liberal) dengan era kapitalisme awal khususnya pada mekanisme eksploitasi kaum pekerja (buruh) sebagaimana dilihat secara sangat jeli oleh Marx dalam Das Kapital.

Marx memahami ikon 'kebebasan' yang diangkat demokrasi (liberal) dengan meletakkan negara dan birokrasinya sebagai instrumen kelas yang muncul untuk mengatur masyarakat yang terpecah demi kepentingan kelas. Pejabat negara merupakan kelompok penghisap melalui kewenangan tindakan politis.

## Epilog

Dari refleksi di atas, jika mengharap pembebasan dari (perilaku) negara maka yang paling utama yang harus dilakukan oleh negara adalah kebebasan modal, bukan kebebasan politik. Kebebasan modal yang akan membuat keadaan hidup manusia bebas dari tekanan kapitalis pribadi. Pengertian ini mengantar pada topik mengenai bentuk negara sosialis atau negara komunis. Atau, paling tidak dalam kerangka wacana demokrasi hari ini dikenal 'demokrasi terkendali', disini peran negara amat besar. Konsep yang terakhir ini (demokrasi terkendali)

sekedar keberpihakan negara terhadap kelas bawah yang secara demografis mayoritas. Meskipun cara berfikir ini saya kira bukan dari Marx. Bagi Marx pembebasan hanya dapat diperoleh melalui penghapusan kelas, seperti yang dituang dalam *The Poverty of Philosophy*, berikut yang dikutip David Held, "Kelas pekerja, dalam perkembangannya, akan mengganti masyarakat sipil lama dengan asosiasi yang menyingkirkan kelas-kelas dan antagonismenya, dan tidak akan ada lagi kekuatan politik semacam itu, karena kekuatan politik justru merupakan pernyataan resmi antagonisme dalam masyarakat sipil".

\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Derrida, Jacques, 1994. *Specters of Marx*, Routledge, New York.
- Harman, Chris. 2000. *Anti Kapitalisme*, terj. Julian dan Setiapbudi, Teplok Press, Jakarta.
- Habermas, Jurgen. 1982. *The Theory of Communicative Action: Reason and Rationalization of Society*, Bacon Press, Boston.
- Held, David. 2006. *Models of Democracy*, The Akbar Tanjung Institute, Jakarta.
- Hughes, Jhon. 1980. *The Philosophy of Social Research*, Long Man, London-New York
- Magnis-Suseno, Franz. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Pemikiran Karl Marx*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Kainz, Howard P. 1974. *Hegel's Philosophy of Right, with Marx Comentary*, Martinus Nijhoff, Netherlands.
- Yakhot, O. 1995. *What is Dialectical Materialism*, Progress Publisher, Moskow.
- Wardaya, Bhaskara T. 2003. *Marx Muda: Marxisme Berwajah Manusiawi*, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta.
- Wolff, Jonathan. 2002. *Why Read Marx Today ?*. Oxford University Press, New York.